

Keabsahan pembebanan jaminan atas harta bersama analisis putusan nomor 63/Pdt.G/2013/Pn.Gsk dan putusan nomor 33/Pdt.g/2011/Pn.Tpi = The legitimacy of encumber collateral on marital property analysis of court decisions number 63/Pdt.G/2013/Pn.Gsk and number 33/Pdt.g/2011/Pn.Tpi

Muhammad Revaldi, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20474624&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Dalam kegiatan perjanjian kredit, tidak jarang kreditur meminta suatu jaminan gunaantisipasi terhadap resiko dalam hal debitur cidera janji. Pada prakteknya, banyak debitur yang sudah menikah, menjaminkan suatu harta benda, akan tetapi harta benda tersebut merupakan harta bersama. Permasalahannya adalah penjaminan tersebut dilakukan dengan tanpa sepengetahuan dan persetujuan secara tegas dari pihak pasangannya, sehingga menimbulkan masalah baru kepada kreditur, oleh karena pihak yang tidak memberikan persetujuannya, menentang dan menuntut jaminan tersebut dikembalikan. Skripsi ini akan membahas mengenai seberapa jauh hak dan kewajiban suami-istri serta bagaimana ketentuan persetujuan kedua belah pihak dalam melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama seharusnya diterapkan, khususnya yang diatur dalam ketentuan Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan bagaimana pula akibat hukum terhadap perbuatan hukum yang dilakukan dengan tidak adanya syarat persetujuan tersebut. Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan tipe penelitian deskriptif-analitis. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa pada prakteknya persetujuan dapat pula dianggap ada sebagai persetujuan yang diberikan secara diam-diam, apabila utang yang dibuat ditujukan untuk ekonomi keluarga, sehingga akibat hukum terhadap perbuatan tersebut tidak selalu menjadi batal demi hukum. Akan tetapi persetujuan yang diberikan secara diam-diam ini dianggap ada hanya selama pihak yang tidak memberikan persetujuannya itu tidak menyatakan keberatan dan menuntut pembatalan terhadap perbuatan tersebut.

ABSTRACT

In the activity of the credit agreement, the creditor usually asks for collateral in anticipation of the risks in case that the debtor breaches the contracts. In reality, many debtors who have married, pledge a property, but the property is part of marital property. The problem is that such guarantees are carried out without acknowledgement and firm consent of the other partner, therefore occurs a new problems to the creditor because the party whom does not give their approval, oppose and demand that the guarantee to be returned. This thesis will discuss how far the rights and obligations of husband and wife and how the provisions of the agreement of both parties in performing legal acts against common property should be applied, especially as regulated in the provisions of Article 36 paragraph 1 of Law Number 1 Year 1974 concerning Marriage, and how the legal consequences of legal acts committed in the absence in the terms of the agreement. This research will use juridical normative research method with descriptive analytical research type. The results of this study found that in practice, the agreement may also be considered as consent given secretly acquiescence , when debt made is intended for families economy, so the legal consequences of such action

are not always be null and void. However, this secret consent is deemed to exist only as long as the non consenting party does not object and demands the cancellation of such action.